eJournal Administrasi Publik, Volume 8, Nomor 2, 2020: 9078-9089

ISSN 0000-0000 , ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

© Copyright 2020

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LARANGAN MEMBERI UANG KEPADA ANAK JALANAN DAN KETENTUAN PIDANA DI KOTA SAMARINDA**

**Tri Sandi[[1]](#footnote-1), Cathas Teguh Prakoso[[2]](#footnote-2), Santi Rande[[3]](#footnote-3)**

# *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan dan Ketentuan Pidana di Kota Samarinda. Efektivitas pelaksanaan program tersebut diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program, serta mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan pelaksanaan program tersebut.*

*Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan key informan yang dipilih secara purposive sampling, juga para informan lainnya dengan menggunakan teknik accidental sampling dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif.*

*Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program larangan memberi uang kepada anak jalanan di Kota Samarinda masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya anggota masyarakat selaku sasaran kebijakan yang terus memberikan uang kepada anak jalanan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program ini adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Namun pada dasarnya Dinas Sosial Kota Samarinda akan terus berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya agar Kota Samarinda menjadi kota yang aman, nyaman dan kondusif.*

Kata Kunci : *Kebijakan, Efektivitas, Implementasi, Partisipasi Masyarakat*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Anak jalanan atau sering disingkat anjal merupakan permasalahan sosial yang memiliki kadar kompleksitas dimana permasalahan yang dialami memiliki persoalan yang beragam. Macam-Macam aktivitas yang dilakukan anak jalanan antara lain, meminta-minta, jual jasa kebersihan mobil, dagang makanan, koran dan terkadang meminta dengan paksa. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena hal ini dapat mengakibatkan efek yang buruk bagi anak.

Upaya untuk mengurangi anak jalanan di Kota Samarinda melibatkan semua *stakeholders* yang ada. Kondisi ini lah yang melatarbelakangi pemerintah Kota Samarinda membuat kebijakan baru dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 “Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalan Dan Gelandangan”.

Yang melatar belakangi dibuatnya peraturan daerah tersebut cerita tentang anak jalanan yang tidak ada habisnya, dengan meningkatnya anak jalanan yang sering meminta-minta di lampu merah dan lain sebagainya yang berada di Kota Samarinda sering mengganggu transportasi di jalan sehingga perlunya payung hukum untuk penyelenggaraan dan penertiban, Untuk mengatasi permasalahan perda ini dibuat untuk melarang masyarakat memberi uang pada kepada anak jalanan. Karena dalam hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat di Kota Samarinda, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah ini. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan ini jika terjadi pelanggaran pemberian uang kepada anak jalanan maka pemberi tersebut melanggar dan akan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). ini sebagai bentuk edukasi, bagi yang ketahuan memberi akan disidangkan.

Maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Setiap masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan, dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalahnya. Berbagai upaya dan cara yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan sosial yang ada..

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana di Kota Samarinda”.

**Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda Telah Efektif?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana di Kota Samarinda?

**KERANGKA DASAR TEORI**

**Teori dan Konsep**

**Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Islamy (dalam Syahrani, 2015:4) kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

**Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Syahrani, 2015:87) mengartikan implementasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tindakan-tindakan dapat saja berupa usaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, yang terarah pada tujuan

**Konsep Efektivitas**

Menurut Bastian (dalam Asnawi 2013:6) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

**Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalan Dan Gelandangan**

Peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan  rumusan Pasal 7 ayat (2) UU No.10 Th. 2004 dikatakan bahwa Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama Gubernur atau bupati/Walikota. Dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 telah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**Definisi Konsepsional**

Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian serta memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Maka definisi konsepsional “Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda” adalah upaya-upaya atau tindakan dalam menjalankan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi di Kota Samarinda, melalui program-program sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah anak jalanan maka dibuatlah dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Peraturan Ini sebagai bentuk edukasi, serta serangkaian tindakan atau keputusan untuk menjalankan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan peran serta masyarakat bagi yang ketahuan memberi uang akan di denda dan dikenakan sanksi.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moch. Nazir (2011:54) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

**Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tersebut fokus penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda” adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Larangan Memberikan Uang Kepada Anak Jalan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda Dengan Indikator Untuk Mengukur Efektivitas Suatu Program Dapat Dilakukan Sebagai Berikut:
2. Ketepatan sasaran
3. Sosialisasi
4. Pencapaian tujuan
5. Pemantauan
6. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda.

**Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling.* Menurut Sugiyono (2016:85) pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *Accidental Sampling* menurut Masyhuri dan Zainuddin (2011:184) yaitu metode dengan cara pengambilan sampel secara kebetulan. Anggota populasi yang secara kebetulan dijumpai oleh peneliti pada saat penelitian, maka itu menjadi sampelnya.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono, (2016:225). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang langsung dengan penelitian yang dilakukan. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lansia. Selain *key informan* peneliti juga membutuhkan informasi/data-data dari *Informan. Informan* yang dipilih adalah anak jalanan dan masyarakat yang membayar pajak di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) kota Samarinda secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipilih secara acak.
2. Data sekunder Menurut Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan dan lain sebagainya

**Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan .Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Pustaka
2. Penelitian Lapangan menggunakan beberapa teknik yaitu :
3. Observasi
4. Wawancara
5. Dokumentasi

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN**

**Ketepatan Sasaran**

Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program efektivitas pelaksanaan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan ketentuan pidana di Kota Samarinda dengan maksud agar program ini memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Dalam menganalisis ketepatan sasaran program ada 3 jenis yaitu ditujukan kepada masyarakat, anak jalanan dan orang tua anak.

**Sosialisasi**

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik.

Pada kenyataannya dengan masih banyaknya masyarakat yang secara cuma-cuma memberikan sedekah kepada anak jalanan, secara tidak langsung menggambarkan ketidaktahuan maupun ketidakyakinan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Hal ini tentu saja sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda belum cukup efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan.

**Pencapaian Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan, sehingga masyarakat harus memberikan kebebasan kepada anak jalanan dengan memberi mereka uang atas dasar rasa kasihan.

**Pemantauan**

Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan program publik. Kewajiban ini dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan program itu sendiri. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi baik adalah alat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Karena masih ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan. Salah satunya kurangnya keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, Hambatan lainnya yaitu, para pekerja sosial belum mampu meyakinkan masyarakat mengenai pelaksanaan penanganan anak jalanan akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan anak jalanan.

**Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda.**

Dari penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda di dalam penanganan anak jalanan antara lain :

1. Faktor orangtua anak jalanan yang kurang peduli terhadap pentingnya masa depan untuk anak.
2. Faktor perilaku masyarakat yang dilandasi rasa belas kasihan semata terhadap anak jalanan sehingga tidak mengatasi aktivitas anak jalanan di jalanan sehari-hari.
3. Faktor minimnya sosialisasi khususnya sosialisasi kepada orangtua anak jalanan dan masyarakat.
4. Faktor sumber daya manusia yang kurang di dalam pemberian penanganan berupa pembinaan kepada anak jalanan.

**PEMBAHASAN**

**Ketepatan Sasaran**

Dinas Sosial Kota Samarinda tidak bekerja sendiri dalam mencapai tujuannya, tetapi melibatkan beberapa instansi yang terkait. Sasaran program juga ditujukan kepada masyarakat, anak jalanan dan orang tua dimana :

1. Tidak memberikan sedekah uang atau barang kepada anak jalanan.
2. Menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, transparan, dan dapat mempertanggung jawabkan anggaran yang dikelolanya.
3. Masyarakat lebih peduli terhadap anak jalanan dan memberikan dukungan positif.
4. Anak jalanan yang berperilaku sebagai pengemis, pengamen, pemulung, dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
5. Pelaku eksploitasi baik keluarga, orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun kejalan sebagai pengemis dan anjal.

Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan pembinaan yang lebih maksimal dan lebih meningkatkan didalam pemberian sosialisasi baik terhadap anak jalanan itu sendiri, sosialisasi kepada orangtua dan masyarakat guna memberi pemahaman kepada mereka bahwa masa depan anak lebih penting dan memberikan informasi mengenai beraktivitas atau membiarkan anak berkeliaran di jalan bukanlah hal yang baik.

**Sosialisasi**

Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat menyangkut sedekah (pemberian uang secara langsung dan cuma-cuma), telah pahami oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dengan mendirikan papan-papan himbauan yang dipasang di beberapa titik di Kota Samarinda, namun sosialisasi tersebut tentunya tidak akan berjalan bilamana masyarakat sendiri khususnya tidak dapat bekerjasama terhadap kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.

Dalam sosialisasi, memiliki tujuan antara lain:

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.
3. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat.
4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat.

Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan dengan tepat dan benar karena hal tersebut merupakan langkah awal yang sangat menentukan pelaksanaan program berikutnya.

**Pencapaian Tujuan**

Maksud dari konsep Proses Pencapaian Tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk membentuk kepribadian seseorang agar selaras dengan nilai dan norma umum yang berlaku di masyarakat.
2. Menyadarkan individu akan hak dan kewajibannya yang pokok dalam masyarakat
3. Membuat individu untuk mampu introspeksi diri
4. Ingin Kota Samarinda bebas dari anak jalanan, dari sebelumnya banyak sekarang berkurang
5. Ingin Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

**Pemantauan**

Pembahasan mengenai pemantauan program, Dinas Sosial Kota Samarinda perlu agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam menekan angka anak jalanan di Samarinda dilandaskan oleh banyaknya yang menjadi penyebab terjunnya anak jalanan dan melakukan aktivitas di jalan. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan dan fungsi terakhir dari proses manajemen dan pengendalian juga merupakan suatu proses pemantauan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. disini juga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menangani anak jalanan.

**Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Larangan Memberi Uang Kepada Anak Jalanan Dan Ketentuan Pidana Di Kota Samarinda.**

Berdasarkan pada hasil yang telah penulis uraikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor dana atau biaya operasional yang kurang.
2. Faktor orangtua anak jalanan yang kurang peduli terhadap masa depan anak.
3. Faktor perilaku masyarakat yang dilandasi rasa belas kasihan semata terhadap anak jalanan sehingga tidak mengatasi aktivitas anak jalanan di jalanan sehari-hari.
4. Faktor minimnya penyebaran informasi atau sosialisasi khususnya sosialisasi kepada orangtua anak jalanan dan masyarakat.
5. Faktor sumber daya manusia yang kurang di dalam pemberian penanganan berupa pembinaan kepada anak jalanan.
6. Serta tidak ada Pemberian sanksi kepada pelanggar

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa kesimpulan yang penulis peroleh, yaitu :

1. Pelaksanaan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan ketentuan pidana di Kota Samarinda, dapat dilihat dari indikator ukuran efektivitas secara keseluruhannya memang tidak efektif. Hal ini didasari oleh beberapa faktor lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:
2. Ketepatan sasaran
3. Sosialisasi
4. Pencapaian tujuan
5. Pemantauan
6. Faktor Penghambat efektivitas pelaksanaan larangan memberi uang kepada anak jalanan dan ketentuan pidana di kota samarinda : Adalah kurangnya dana operasional untuk membiayai semua kegiatan sosialisasi, kurangnya kesadaran masyarakat kepada anak jalanan mengenai bahayanya atau resiko jika anak melakukan aktivitas di jalanan dan perilaku masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap larangan dan tindak pidana.

**Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukkan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Dinas Sosial kota samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi mensukseskan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini semata-mata bentuk edukasi untuk masyarakat agar tidak melanggar Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017. baik itu yang larangan memberi uang ataupun yang bertransaksi di jalanan dengan anak jalanan.

1. Bagi pemerintah
2. Diharapkan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengkaji kembali dana operasional bagi Dinas Sosial yang digunakan sebagai penunjang ketercapaian tujuan. Agar penyampaian dari pelaksanaan larangan memberi uang dapat dipahami yaitu dengan membuat program partisipasi dalam peningkatan kesadaran masyarakat.
3. lebih meningkatkan sosialisasi Aktivitas untuk menggugah masyarakat agar mulai tergerak dan peduli terhadap masalah larangan memberi uang kepada anak jalanan. Kegiatan ini dapat berupa penerbitan buletin, poster, buku-buku, iklan layanan masyarakat di TV, program pekerja anak di radio dan sebagainya.
4. Mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, baik SDM maupun fasilitas lain sehingga program dapat berjalan berkelanjutan. Dan Pemantauan program memang belum cukup efektif namun harus lebih dioptimalkan lagi dengan menambah jumlah pengurus ataupun relawan yang secara khusus memiliki tugas memonitoring kegiatan anak jalanan setelah mereka mengikuti program pemberdayaan. Sehingga ada pembagian tugas yang jelas antara pengurus yang mengurusi keseharian organisasi dengan pengurus yang secara khusus mengurusi atau memantau.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulsyani. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

1. G, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok.* Jakarta : Rineka Cipta.

Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana

Hanum, Farida. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta; Kanwa Publisher

Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen (Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen).* Yogyakarta: Gosyen Publishing

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy.*Jakarta:Gramedia

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: Refika Aditama

Masyhuri dan Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama

Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook.* USA: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muasarah. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pnpm*. Universitas Brawijaya Malang

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Siagian, Sondang. P . 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Bumi Aksara

Soetomo. 2013. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suyanto, Dr. Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di era Masyarakat Post-Modernisme*. Surabaya: Prenada Media Group Cipta

Sutrisno, Edy 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Kencana

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Makindo Grafika

Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses Dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS

Winardi. 2011. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wulansari, Dewi. 2013. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: Refika Aditama

**Dokumen-dokumen**

Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalan Dan Gelandangan

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trisandiku@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [↑](#footnote-ref-3)